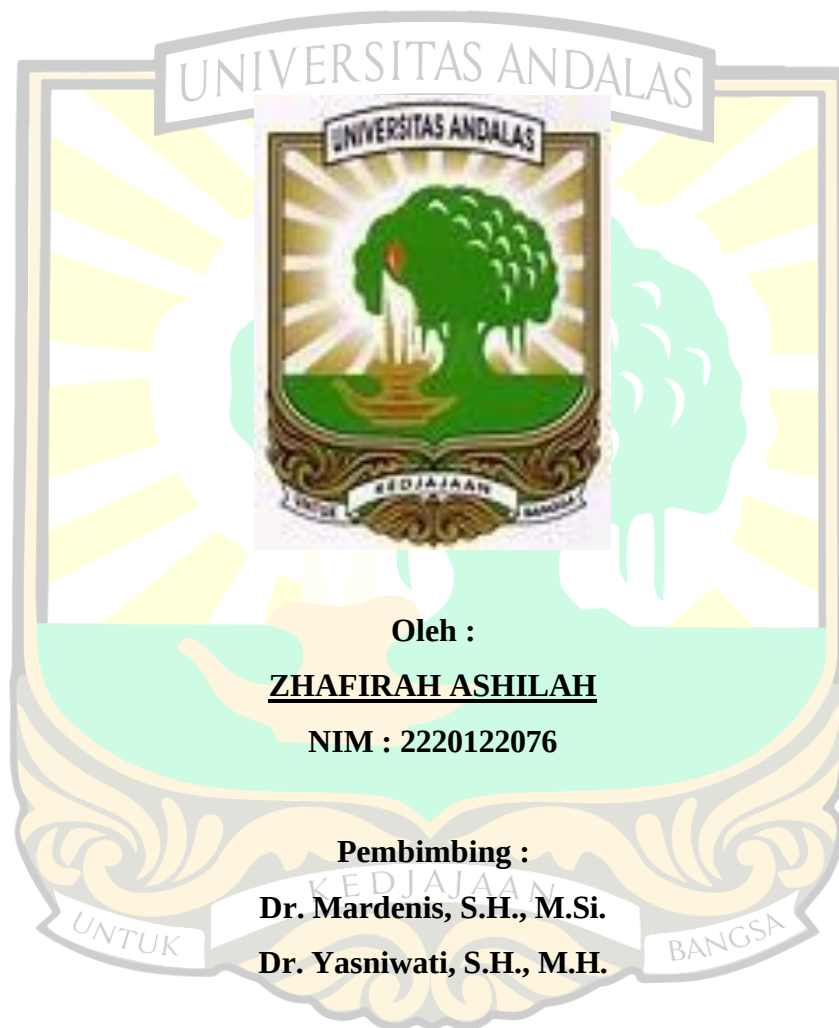


**KEABSAHAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA
DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

TESIS

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Andalas***



Oleh :

ZHAFIRAH ASHILAH

NIM : 2220122076

Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H., M.Si.

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2025**

KEABSAHAN HIBAH ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

(Zhafirah Ashilah, 2220122076, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 91 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Perkawinan memiliki akibat hukum, tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri, tetapi juga terhadap harta dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Salah satu karakteristik harta adalah dapat dialihkan, seperti peralihan hak atas tanah yang terjadi melalui perbuatan hukum, salah satunya adalah hibah. Penghibahan tersebut harus memperhatikan syarat-syarat penghibahan dan ketentuan yang berlaku agar sah secara hukum. Terkait pemberian atas harta bersama tersebut harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan dan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh keduanya. Namun, tidak sedikit diantaranya terjadi pemberian hibah yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap obyek hibah maupun terhadap subyek hibah itu sendiri. Ketidakpastian hukum akibat aktivitas hibah atas harta bersama yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan akan menjadi permasalahan, seperti dalam Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hibah atas harta bersama pada Kasus Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi? 2) Bagaimana keabsahan hibah atas harta bersama dalam dalm perkawinan menurut perspektif hukum perdata? Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara deskriptif analisis dengan sumber data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi, menolak gugatan dari Para Penggugat karena berpendapat bahwa hibah tersebut sah menurut hukum, karena pemberian hibah tersebut adalah keputusan bebas dari Alm. Oejan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPperdata. 2) Pemberian hibah agar sah menurut hukum haruslah memenuhi syarat-syarat penghibahan, seperti hibah atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari suami istri berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

Kata Kunci : Keabsahan Hibah, Harta Bersama, Perkawinan

THE VALIDITY OF GRANTS OF JOINT PROPERTY IN MARRIAGE ACCORDING TO THE CIVIL LAW PERSPECTIVE

*(Zhafirah Ashilah, 2220122076, Thesis, Master of Notary, Faculty of Law,
Andalas University, 91 Pages, 2025)*

ABSTRACT

Marriage has legal consequences, not only for the individuals entering into the marriage, but also for the rights and obligations that bind the husband and wife, as well as for the property within the marriage. The property in marriage is divided into joint property and separate property. One characteristic of property is that it can be transferred, such as the transfer of rights over land that occurs through legal actions, one of which is a gift. The gift must comply with the requirements of donation and applicable regulations to be legally valid. Regarding the transfer of joint property, it must be done with the consent of both parties, in accordance with Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law, and is influenced by whether a marriage contract exists between the parties. However, there are cases where gifts are given in violation of the procedure. This can lead to legal uncertainty, both concerning the object of the gift and the subject of the gift itself. Legal uncertainty resulting from the donation of joint property in violation of the applicable laws can cause issues, as seen in Case Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi. The research questions in this study are: 1) What were the judges' considerations in deciding the case of the donation of joint property in Case Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi? 2) What is the validity of the gift of joint property in marriage according to the perspective of civil law? The research method to be used is normative legal research with a descriptive-analytical problem approach, using secondary data sources. The results of this study are: 1) Based on the legal considerations of the Cibinong District Court Panel in Case Number 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi, the lawsuit from the Plaintiffs was rejected because the court held that the gift was legally valid, as the donation was a free decision by the late Oejan, in accordance with the provisions of Article 1666 of the Civil Code. 2) For the gift to be legally valid, it must meet the requirements for donation, such as the donation of joint property, which must first obtain the consent of both husband and wife in accordance with the provisions of Article 36 paragraph (1) of the Marriage Law.

Keywords : Validity of the Grant, Joint Property, Marriage